

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Disusun Oleh :
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK



dispendik@gresikkab.go.id



dispendik.gresikkab.go.id



Jalan Arif Rahman Hakim No. 2

(031) 3981315



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

LKjIP ini memuat capaian kinerja atas sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta merupakan wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target Renstra sebelumnya sekaligus mengimplementasikan sasaran dan indikator dalam Renstra yang baru guna menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja.

Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik serta menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Gresik, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



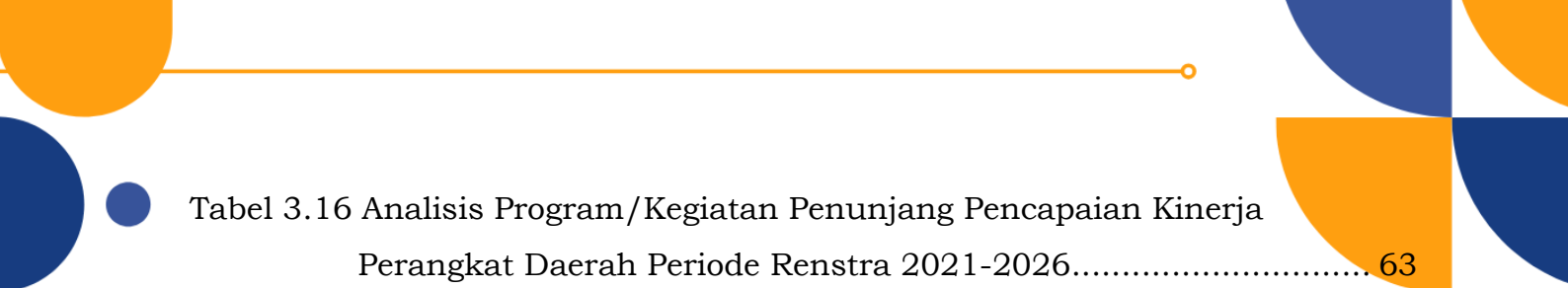
Dr. S. HARIYANTO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	2
1.3 Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	4
1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.5 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	7
1.6 Landasan Hukum	8
1.7 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	10
1.8 Sistematika Penyusunan	13
BAB II Perencanaan Kinerja	15
2.1 Visi	16
2.2 Misi	17
2.3 Tujuan dan Sasaran	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	29
3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	34
3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis	38
3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Nasional/Jatim/Kabupaten Kota Lain	42
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	46
3.7 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	56
3.8 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	59
3.9 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	63
BAB IV Penutup	70
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan	5
Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2025 Renstra 2021-2026	19
Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029	19
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025	29
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025	30
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2021-2026	34
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2025-2029	35
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode Renstra 2021-2026.....	38
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode Renstra 2025-2029.....	39
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov. Jatim/kab. kota lain Periode Renstra 2021-2026.....	42
Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional /Prov. Jatim/kab. kota lain Periode Renstra 2025-2029.....	43
Tabel 3.10 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Periode Renstra 2021-2026.....	46
Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Periode Renstra 2025-2029	48
Tabel 3.12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Periode Renstra 2021-2026	56
Tabel 3.13 Alokasi Anggaran dan Realisasi Periode Renstra 2025-2029	56
Tabel 3.14 Efisiensi Periode Renstra 2021-2026.....	60
Tabel 3.15 Efisiensi Periode Renstra 2025-2029	61



Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Renstra 2021-2026.....	63
Tabel 3.17 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Renstra 2025-2029.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.....	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini juga merupakan salah satu instrumen evaluasi atas pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dikelola. Sejalan dengan hal tersebut LKJIP 2025 disusun didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

LKjIP disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta sebagai instrumen evaluasi terhadap tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja, sehingga mampu menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang dicapai, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah didukung oleh struktur organisasi yang disusun untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja. Tahun 2025 menjadi periode penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena berada pada

masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja, tanpa mengesampingkan prinsip kesinambungan dan akuntabilitas.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
2. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

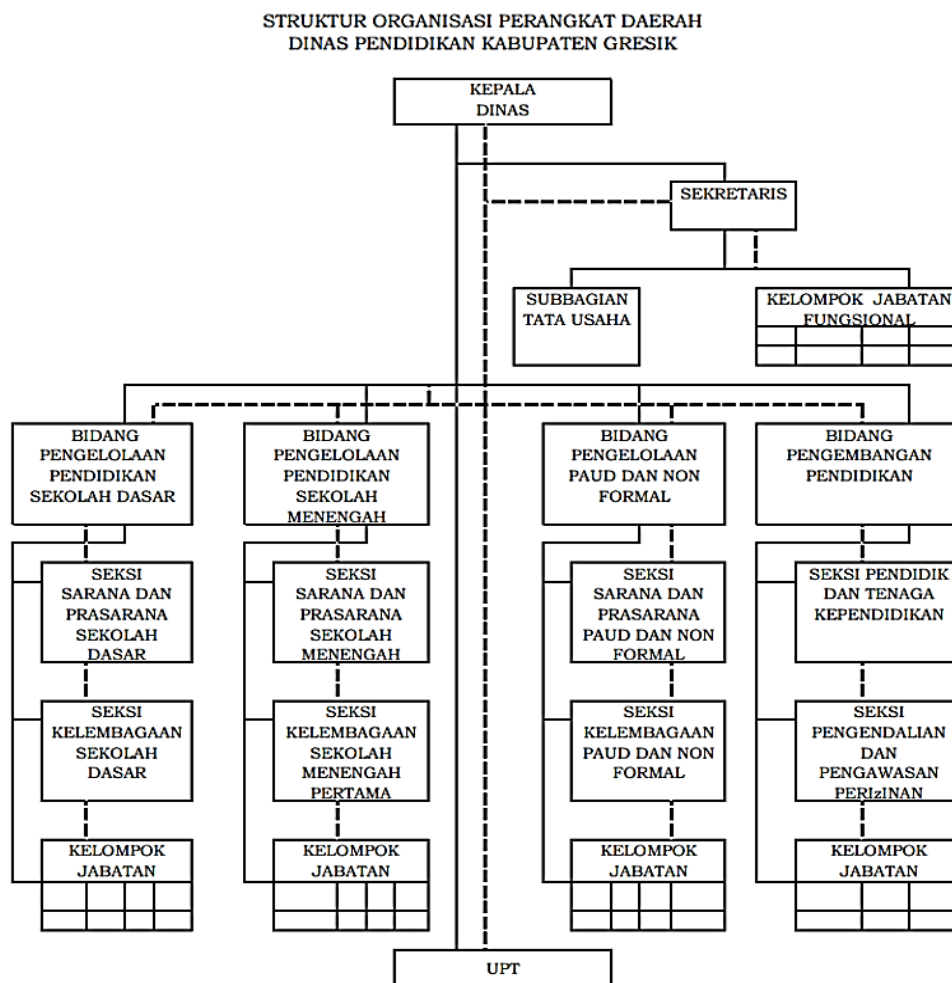
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah : “Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan.”

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Anak Usia Dini dan NonFormal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan PAUD dan Non Formal;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Non Formal;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Gresik

1.3. TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pasal 33, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mempunyai Tata Kerja sebagai berikut :

1) Setiap Pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

3) Setiap Pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2025 memiliki sumber daya manusia sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama		1
	- Pangkat / Golongan :		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	- Pendidikan :		
	S3	1	
	Administrator		4
	- Pangkat / Golongan :		
	Penata (III/c)	1	
	Penata Tk. I (III/d)		
	Pembina (IV/a)	2	
	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
	- Pendidikan :		
	S1		
	S2	1	
	S3	3	
	Pengawas		10
	- Pangkat / Golongan :		

		Penata Muda Tk. I (III/b)	1	
		Penata (III/c)	2	
		Penata Tk. I (III/d)	6	
		Pembina (IV/a)	1	
	-	Pendidikan :		
		S1	7	
		S2	3	
	Pelaksana / JFU			72
	-	Pangkat / Golongan :		
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
		Pengatur (II/c)	6	
		Pengatur Tk I. (II/d)	14	
		Penata Muda (III/a)	34	
		Penata Muda Tk. I (III/b)	6	
		Penata (III/c)	2	
		Penata Tk. I (III/d)	8	
		Pembina (IV/a)	1	
	-	Pendidikan :		
		SMA	24	
		D3	3	
		S1	45	
	JUMLAH			
	Jabatan Fungsional Tertentu			4945
2	-	Pangkat / Golongan :		
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
		Pengatur (II/c)	1	
		Pengatur Tk I. (II/d)	4	
		Penata Muda (III/a)	219	
		Penata Muda Tk. I (III/b)	458	
		Penata (III/c)	307	

		Penata Tk. I (III/d)	479	
		Pembina (IV/a)	322	
		Pembina Tk. I (IV/b)	331	
		Pembina Utama Muda (IV/c)	170	
		Pembina Utama Madya (IV/d)	3	
		PPPK Guru (IX)	2084	
		PW S1	566	
	-	Pendidikan :		
		SMA	2	
		D2	23	
		D3	8	
		D4	3	
		S1	4680	
		S2	229	
		JUMLAH		
3		Non ASN		33
		Pendidikan :		
		SD	4	
		SMP	1	
		SMA	13	
		D2		
		D3		
		S1	15	
		JUMLAH		
		JUMLAH TOTAL PERSONIL		5065

Sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga teknis pendidikan, serta aparatur pengelola layanan pendidikan pada tingkat perangkat daerah dan satuan pendidikan berjumlah 5065 pegawai.

1.5. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, serta relevansi

dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks seiring dengan dinamika perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan perkembangan global yang menuntut daya saing sumber daya manusia yang adaptif dan berkarakter. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan pendidikan, termasuk pelaksanaan wajib belajar dan penguatan tata kelola pendidikan. Berbagai regulasi daerah dan kebijakan teknis telah ditetapkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan menunjukkan capaian yang positif, namun demikian masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Tantangan tersebut antara lain terkait pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan mutu satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, serta penguatan manajemen dan tata kelola pendidikan. Dalam konteks Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja periode sebelumnya sekaligus menyiapkan fondasi kebijakan dan program pendidikan yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah berikutnya. Oleh karena itu, aspek strategis dan permasalahan utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

1.6. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

1.7. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor: 700/2306.1/437.72/2025
Tanggal 14 Oktober 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Melengkapi dokumen Renstra, diberi tanggal penetapan, diformalkan melalui pengesahan pejabat berwenang, serta disusun Rencana Aksi dengan jadwal dan target kinerja terukur.	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen rencana strategis (Renstra) tertanggal 18 September 2025, diformalkan dengan pengesahan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; - Dokumen Rencana Aksi yang disusun dengan jadwal dan target kinerja yang terukur.
	Memformalkan seluruh dokumen perencanaan kinerja melalui penetapan resmi yang dilengkapi tanggal dan nomor keputusan agar memiliki legalitas yang sah.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perencanaan kinerja yang telah diformalkan yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 420/0043/437.53/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 dan telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
	Mengesahkan dokumen SKP dan Monev Renja, melampirkan laporan hasil Renstra, serta melengkapi bukti dukung capaian kinerja secara memadai.	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen SKP (Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag TU, dan Staff TU) yang telah disahkan;

		- Dokumen Monev Renja TW III yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik namun belum ditandatangani oleh kepala Bappeda Kabupaten Gresik - Telah dilampirkan dokumen hasil Rensta tertanggal 18 September 2025 dan diformalkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Gresik.
	Mengesahkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen pengukuran kinerja secara resmi guna mendukung optimalisasi evaluasi dan akuntabilitas kinerja.	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 050/0062/437.53/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tanggal 10 November 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; - Dokumen LKjIP 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai melalui sosialisasi, serta menyusun bukti dukung kinerja secara spesifik, lengkap, dan valid.	Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sosialisasi yang dibuktikan dengan Nota Dinas Nomor 050/3380/437.53/2025 Tanggal 6 Oktober 2025 Perihal Undangan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, notulen pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir serta dokumentasi kegiatan.
	Memastikan laporan kinerja memenuhi formalitas administrasi dan memperkuat akuntabilitas penyusunan dokumen.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen LKJIP Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

	Memformalkan dokumen Laporan Kinerja serta melaksanakan reviu oleh APIP untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
	Melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan uraian upaya nyata, hambatan pencapaian indikator, serta dokumentasi tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dilengkapi: a. Uraian upaya nyata (Halaman 40); b. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja (1.4 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama halaman 4 dan halaman 32); c. Tindak lanjut SAKIP Tahun 2023 yang telah dilakukan sesuai rekomendasi (halaman 6)
	Menyelesaikan seluruh rekomendasi yang masih dalam proses dengan memperbarui bukti dokumen perbaikan, notulen rapat, daftar hadir, dan laporan hasil kegiatan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai SAKIP.	Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat evaluasi penyerapan tahun 2025 dan rapat koordinasi tindak lanjut LHE SAKIP 2024 yang dibuktikan dengan Nota Dinas Nomor: 050/3336/437.53/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal undangan evaluasi penyerapan tahun 2025, notulen koordinasi tindak lanjut LHE SAKIP 2024, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan.

1.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan secara ringkas Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, analisis capaian kinerja meliputi:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain
- e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
- f. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
- g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah



BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan proses penetapan arah, sasaran, dan target kinerja organisasi yang disusun secara sistematis sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan. Perencanaan kinerja ini menjadi wujud komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, inklusif dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025 diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja. Keterpaduan tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara sasaran strategis, program, kegiatan, dan target kinerja. Sehingga seluruh sumber daya dapat dialokasi secara efektif guna mendukung ketercapaian pembangunan bidang pendidikan, serta memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 meliputi:

- a. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
- c. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 & Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun Anggaran 2025;
- e. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Penggunaan 2 (dua) dokumen Rencana Strategis tersebut mencerminkan bahwa Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, dimana pelaksanaan kinerja masih mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 sekaligus penyelarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Target kinerja yang ditetapkan mempresentasikan ukuran keberhasilan organisasi yang bersifat spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis selanjutnya diturunkan secara berjenjang (cascading) ke unit kerja dan pejabat terkait sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Dengan mekanisme tersebut, Perencanaan Kinerja menjadi instrumen pengendalian manajerial yang mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Melalui Perencanaan Kinerja ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Perencanaan Kinerja Tahun 2025 diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

2.1. VISI

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yaitu :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Visi tersebut dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber daya dan potensi yang dimiliki, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar, penguatan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan karakter

masyarakat yang berakhlakul karimah sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan berakhirnya periode RPJMD Tahun 2021–2026, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, yaitu :

**“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Visi tersebut menekankan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan peran Kabupaten Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang didukung oleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata, dan inklusif.

2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, ditetapkan misi Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, salah satunya adalah Misi IV: Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Misi tersebut menjadi dasar peran strategis Dinas Pendidikan dalam memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya komponen Indeks Pendidikan.

Selanjutnya, pada periode RPJMD Tahun 2025–2029, perencanaan kinerja bidang pendidikan secara khusus mendukung Misi I, yaitu: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah, guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.

Dengan demikian, Perencanaan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 diarahkan untuk menjamin kesinambungan kebijakan

pembangunan pendidikan serta memperkuat kontribusi sektor pendidikan dalam pencapaian misi pembangunan daerah.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang kemudian diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Sedangkan, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode waktu tertentu sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi.

Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dirumuskan dalam untuk jangka waktu tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan”

Tujuan strategis tersebut kemudian ditelaah serta dirumuskan Kembali untuk jangka waktu 2025-2029 sebagai berikut:

“Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat”

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Target Kinerja Tahun 2025 Renstra 2021-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	10,10 Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,99 Tahun
2.	Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	97,04%
		Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	90,72%

Selanjutnya, sasaran dan target kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD, SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	80,76%
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	99,40%
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	29,51%
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	11,22%

		Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	94,28%
			Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,80%
		Meningkatkan kualitas,akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	91,77%
			Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98,80%
			Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98.80%
			Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP	98,80%
			Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100%
		Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD,SMP)	Rata-rata Kemampuan Literasi	77,42%
			Rata-rata Kemampuan Numerasi	66,86%

		Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim Keamanan SD	64,80%
			Iklim Keamanan SMP	63,51%
		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebinekaan SD	76,57%
			Iklim Kebinekaan SMP	73,67%
		Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar (SD,SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan	93,09%
		Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	78,90%
			Iklim Inklusivitas SMP	74,50%
		Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah	1,42%

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melaksanakan program dan kegiatan yang disusun secara terarah dan terintegrasi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
	DINAS PENDIDIKAN				1.070.284.013.606,07
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	100	%	589.351.630.518,07
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	4	Dokumen	176.675.450,00
1.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	67.720.200,00
1.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	108.955.250,00
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan Jumlah lembaga swasta	12	Bulan	583.241.686.919,07
1.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.368	Orang/bulan	583.241.686.919,07
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	60	Jenis	854.591.703,00
		Jumlah jenis mesin dan barang cetakan	25	Jenis	
		Jumlah perjalanan dinas	123	Kali	
1.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	7.869.700,00
1.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Paket	489.199.000,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
1.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	102.906.858,00
1.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	130.165.725,00
1.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	6	Dokumen	74.205.580,00
1.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Laporan	50.244.840,00
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	12	Bulan	4.768.010.829,00
		Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 tahun	12	Bulan	
1.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	1.059.417.404,00
1.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	44.073.425,00
1.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan	3.664.520.000,00
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	3	Kegiatan	310.665.617,00
1.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61	Unit	310.665.617,00
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	100	%	419.470.747.088,00
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	83,66	%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	107,32	%	
		APK SMP/mts/sederajat	97,34	%	
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	105	%	

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	97	%	
		APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	84,76	%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	97	%	
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	79	%	
		Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100	%	
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi	823	Lembaga	164.836.280.424,00
1.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	Unit	2.054.250.792,00
1.01.02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	566	Paket	4.850.568.563,00
1.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700	Peserta Didik	137.916.400,00
1.01.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekola	549	Satuan Pendidikan	15.522.650.000,00
1.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	550	Satuan Pendidikan	104.029.862.576,00
1.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	Ruang	1.455.086.347,00
1.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33	Unit	1.037.474.527,00
1.01.02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	453	Orang	70.596.000,00
1.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	453	Satuan Pendidikan	99.003.200,00
1.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33	Ruang	16.536.567.019,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
1.01.02.2.01.0054.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	66.118	Peserta Didik	19.042.305.000,00
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi	253	Lembaga	111.963.443.812,00
1.01.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	Ruang	758.612.022,00
1.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang	8.474.402.482,00
1.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	umlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	Unit	3.890.551.896,00
1.01.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7.586	Paket	4.904.374.690,00
1.01.02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35.353	Peserta Didik	20.661.400.000,00
1.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.975	Peserta Didik	100.000.000,00
1.01.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	121	Satuan Pendidikan	8.092.650.000,00
1.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	121	Satuan Pendidikan	64.757.670.322,00
1.01.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	121	Dokumen	206.080.400,00
1.01.02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	121	Satuan Pendidikan	85.500.000,00
1.01.02.2.02.0060.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	244	Orang	32.202.000,00
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	60	%	70.745.850.966,00
1.01.02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	9	Paket	10.131.277.000,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
1.01.02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10.000	Peserta Didik	14.099.906.000,00
1.01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.206	Orang	7.694.400.000,00
1.01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.000	Satuan Pendidikan	287.630.966,00
1.01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.606	Satuan Pendidikan	38.109.240.000,00
1.01.02.2.03.0045.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	86.717.000,00
1.01.02.2.03.0047.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3	Satuan Pendidikan	336.680.000,00
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	100	%	71.925.171.886,00
1.01.02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya	1.975	Peserta Didik	39.407.702.000,00
1.01.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.975	Satuan Pendidikan	19.850.721.286,00
1.01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2.223	Satuan Pendidikan	2.626.330.000,00
1.01.02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.485	Orang	10.005.000.000,00
1.01.02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	12	Peserta Didik	35.418.600,00
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	99,37	%	61.461.636.000,00
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	100	%	

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2025
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	100	%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	99	%	
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	19.088	Guru	61.461.636.000,00
1.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2475	Dokumen	61.461.636.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	10,10 Tahun	10,13 Tahun	100,30 %	Sangat Tinggi
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,99 Tahun	13,99 Tahun	100%	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	97,04%	98,51%	101,51 %	Sangat Tinggi
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	90,72%	95,35%	105,10 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis 1 Dinas Pendidikan yaitu Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100,30%, dan indikator Angka Harapan Lama Sekolah mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100 %. Sedangkan pada sasaran strategis 2 Dinas Pendidikan yaitu Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) dengan indikator Prosentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi SNP mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 101,51 %, dan indikator Prosentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi SNP mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 105,10 %.

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP)	Angka Partispasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	80,76	80,76	100%	Sangat Tinggi
		Angka Partispasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	99,40	99,40	100%	Sangat Tinggi
		Angka Partispasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	29,51	29,51	100%	Sangat Tinggi
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,22	12,77	114%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklm inklusivitas SD (%)	78,90	78,90	100%	Sangat Tinggi
		Iklm inklusivitas SMP (%)	74,50	74,50	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklm keamanan SD (%)	64,80	64,80	100%	Sangat Tinggi
		Iklm keamanan SMP (%)	63,51	63,51	100%	Sangat Tinggi
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	1,41	1,41	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	94,28	94,28	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	98,80	98,83	100%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	91,77	91,77	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	98,80	98,83	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	98,80	98,83	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	98,80	98,83	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100,00	100,00	100%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	77,42	77,42	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	66,86	66,86	100%	Sangat Tinggi
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	76,57	76,57	100%	Sangat Tinggi
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	73,67	73,67	100%	Sangat Tinggi
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	93,09	93,84	101%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Hal tersebut tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada sasaran strategis meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang PAUD, SD, dan SMP menunjukkan capaian sebesar 100 persen. Selain itu, indikator proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga menunjukkan capaian melebihi target, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap. Selanjutnya, pada sasaran strategis meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dan pembangunan daerah serta desa di sektor pendidikan, indikator iklim inklusivitas pada jenjang SD dan SMP mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik telah memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses bagi seluruh peserta didik.

Pada sasaran strategis meningkatkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak secara inklusif di sektor pendidikan, indikator iklim keamanan sekolah pada jenjang SD dan SMP mencapai target sebesar 100 persen. Capaian tersebut menggambarkan bahwa lingkungan satuan pendidikan relatif kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang aman bagi peserta didik. Sementara itu, pada sasaran strategis menurunkan angka putus sekolah, indikator Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan dasar tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan putus sekolah dan keberlanjutan pendidikan anak telah berjalan secara efektif.

Pada sasaran strategis meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, indikator proporsi guru PAUD yang berkualifikasi sesuai ketentuan serta kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik SD dan SMP menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan mutu

pendidik sebagai faktor kunci peningkatan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, pada sasaran strategis meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusivitas pengendalian serta perizinan pendidikan, indikator yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kelulusan, menunjukkan capaian yang mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola satuan pendidikan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada sasaran strategis meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar, indikator rata-rata kemampuan literasi dan numerasi mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pembelajaran dasar telah memberikan hasil yang positif. Selain itu, pada sasaran strategis penguatan gender dan inklusivitas dalam pembangunan pendidikan, indikator iklim kebhinekaan pada jenjang SD dan SMP menunjukkan capaian sesuai target, yang mencerminkan lingkungan pendidikan yang toleran dan menghargai keberagaman. Adapun pada sasaran strategis meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di wilayah rentan, indikator rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan menunjukkan capaian yang melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah rentan telah berjalan dengan baik.

3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi					Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,56 Tahun	9,75 Tahun	10,01 Tahun	10,03 Tahun	10,13 Tahun	Meningkat
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,77 Tahun	13,96 Tahun	13,97 Tahun	13,98 Tahun	13,99 Tahun	Meningkat
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	48,25%	28,13%	97,01%	97,03%	98,51%	Meningkat
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	55,67%	22,58%	87,41%	87,72%	95,35%	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga Tahun 2025. Pada sasaran strategis Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah, indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025. Kondisi ini

mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan penduduk usia sekolah.

Demikian pula, indikator Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan secara bertahap dan relatif stabil, yang mencerminkan meningkatnya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada sasaran strategis Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), indikator Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Hal ini menggambarkan adanya penguatan pemenuhan standar mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Indikator Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, yang mencerminkan perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Baseline	Realisasi	Keterangan
			2024	2025	
1	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	77,79	80,76	Meningkat
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	99,29	99,40	Meningkat
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	24,54	29,51	Meningkat

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Baseline	Realisasi	Keterangan
			2024	2025	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,45	12,77	Meningkat
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim inklusivitas SD (%)	78,00	78,90	Meningkat
		Iklim inklusivitas SMP (%)	73,00	74,50	Meningkat
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim keamanan SD (%)	62,30	64,80	Meningkat
		Iklim keamanan SMP (%)	61,11	63,51	Meningkat
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	1,44	1,41	Meningkat
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	91,51	94,28	Meningkat
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	98,78	98,83	Meningkat
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	91,36	91,77	Meningkat
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	98,78	98,83	Meningkat
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	98,78	98,83	Meningkat

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Baseline	Realisasi	Keterangan
			2024	2025	
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	98,78	98,83	Meningkat
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100,00	100,00	Meningkat
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	75,62	77,42	Meningkat
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	64,66	66,86	Meningkat
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	75,57	76,57	Meningkat
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	72,67	63,51	Meningkat
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	93,07	93,84	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja pada Renstra 2025–2029 menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2025. Pengukuran kinerja ini merupakan pengukuran awal (baseline) sebagai pijakan pelaksanaan Renstra periode 2025–2029.

3.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2026	2025	
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,14 Tahun	10,13 Tahun	Positif
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,82 Tahun	13,99 Tahun	Positif
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	94,60%	98,51%	Positif
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	100,00%	95,35%	Negatif

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja telah mendekati dan bahkan melampaui target akhir Renstra pada sebagian besar indikator kinerja strategis. Pada sasaran strategis Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah, indikator Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Demikian pula, indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2025 telah mencapai dan melampaui target akhir Renstra, yang mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada sasaran strategis Peningkatan Capaian Standar Nasional

Pendidikan (SNP), indikator Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP pada Tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar mutu pendidikan dasar telah berjalan dengan baik dan konsisten. Adapun indikator Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP pada Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra.

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2029	2025	
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	92,64	80,76	Negatif
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	99,86	99,40	Negatif
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	49,42	29,51	Negatif
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,96	12,77	Positif
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim inklusivitas SD (%)	82,50	78,90	Negatif
		Iklim inklusivitas SMP (%)	80,50	74,50	Negatif
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim keamanan SD (%)	74,80	64,80	Negatif
		Iklim keamanan SMP (%)	73,11	63,51	Negatif
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	1,34	1,41	Positif

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2029	2025	
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	96,28	94,28	Negatif
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	98,88	98,83	Negatif
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	93,41	91,77	Negatif
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	98,88	98,83	Negatif
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	98,88	98,83	Negatif
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	98,88	98,83	Negatif
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100,00	100,00	Negatif
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	84,62	77,42	Negatif
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	75,66	66,86	Negatif
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	80,57	76,57	Negatif
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	77,67	63,51	Negatif

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2029	2025	
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	93,17	93,84	Positif

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 belum dimaksudkan untuk sepenuhnya mencapai target akhir Renstra, mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra periode 2025–2029. Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada pada tahap penyiapan dan penguatan baseline. Dengan penguatan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, target akhir Renstra 2025–2029 diyakini dapat dicapai secara optimal.

3.5. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / prov. Jatim / kab. kota lain Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional/ Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain*	Dinas Pendidikan Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,39 Tahun	10,13 Tahun	Lebih Tinggi dari Provinsi Jatim
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,44 Tahun	13,99 Tahun	Lebih Tinggi dari Provinsi Jatim
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	N/A	98,51%	-
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	N/A	95,35%	-

* Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas Pada sasaran strategis Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah, indikator Rata-rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tercatat sebesar 10,13 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang sebesar 8,39 tahun. Demikian pula pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah, capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebesar 13,99 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata

Provinsi Jawa Timur sebesar 13,44 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan penduduk Kabupaten Gresik telah berada di atas rata-rata provinsi dan mencerminkan hasil positif dari kebijakan serta program pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan.

Pada sasaran strategis Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi SNP dan Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi SNP masing-masing mencapai 98,51% dan 95,35%. Meskipun data pembandingan nasional maupun Provinsi Jawa Timur untuk indikator tersebut belum tersedia (N/A), capaian yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Gresik telah berada pada tingkat yang sangat baik.

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / prov. Jatim / kab. kota lain Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional/ Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain*	Dinas Pendidikan Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	77,30	80,76	Lebih Tinggi
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	98,53	99,40	Lebih Tinggi
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	25,53	29,51	Lebih Tinggi
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	N/A	12,77	-

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional/ Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain*	Dinas Pendidikan Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklm inklusivitas SD (%)	61,40	78,90	Lebih Tinggi
		Iklm inklusivitas SMP (%)	59,66	74,50	Lebih Tinggi
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklm keamanan SD (%)	75,82	64,80	Lebih Rendah
		Iklm keamanan SMP (%)	71,20	63,51	Lebih Rendah
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	N/A	1,41	-
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	N/A	94,28	-
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	N/A	98,83	-
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	62,97	91,77	Lebih Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	N/A	98,83	-
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	N/A	98,83	-
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	N/A	98,83	-

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional/ Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain*	Dinas Pendidikan Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	N/A	100,00	-
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	66,29	77,42	Lebih Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	59,70	66,86	Lebih Tinggi
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	72,55	76,57	Lebih Tinggi
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	71,31	63,51	Lebih Rendah
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	N/A	93,84	-

*Nasional

Berdasarkan tabel di atas Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 belum dapat dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan belum tersedianya data pembandingan nasional maupun provinsi untuk sebagian besar indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Sebagian besar indikator kinerja pada Renstra 2025–2029 merupakan indikator baru yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan daerah, dinamika pembangunan pendidikan, serta kebutuhan strategis daerah. Oleh karena itu, data capaian nasional maupun provinsi yang sepadan dan dapat digunakan sebagai pembandingan pada Tahun 2025 masih belum tersedia.

Meskipun demikian, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif, khususnya pada indikator partisipasi pendidikan, kualitas satuan pendidikan, serta peningkatan literasi dan numerasi. Capaian tersebut menjadi baseline awal dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029 dan akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan tersedianya data pembanding nasional maupun provinsi.

3.6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 10 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Faktor penunjang: - Perluasan akses dan daya tampung pendidikan, melalui pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD guna menjamin keberlanjutan layanan pendidikan. - Penguatan pembiayaan pendidikan, melalui pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan untuk mengurangi hambatan ekonomi. - Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan. - Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.	nihil

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi
			- Penyediaan layanan pendidikan alternatif, melalui pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan sebagai jalur bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah.	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Faktor penunjang: - Perluasan akses dan daya tampung pendidikan, melalui pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD guna menjamin keberlanjutan layanan pendidikan. - Penguatan pembiayaan pendidikan, melalui pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan untuk mengurangi hambatan ekonomi. - Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan. - Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang. - Penyediaan layanan pendidikan alternatif, melalui pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan sebagai jalur bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah.	nihil
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	nihil

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	nihil

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD, SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	Faktor penunjang: - Adanya pengadaan perlengkapan PAUD berupa pengadaan buku dan perangkat pendukung pembelajaran yang meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik satuan PAUD. - Adanya pemberian BOP PAUD, yang membantu keberlangsungan operasional satuan pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan PAUD.	nihil

		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	Faktor penunjang: - Adanya pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas dan utilitas sekolah, yang meningkatkan kapasitas daya tampung dan kelayakan lingkungan belajar sehingga mendukung keberlanjutan peserta didik dalam sistem pendidikan. - Terdapat pengadaan perlengkapan sekolah yang memperkuat fasilitas pembelajaran dan mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal di satuan pendidikan. - Pemberian BOSDA bagi sekolah swasta, yang membantu keberlangsungan operasional satuan pendidikan dan mengurangi hambatan biaya bagi peserta didik.	nihil
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	Faktor penunjang: - Pemberian BOP Kesetaraan dan dukungan operasional bagi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta lembaga pendidikan nonformal, yang membantu keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik yang tidak terlayani di jalur formal. - Penguatan tata kelola dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. - Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Ujian Kesetaraan Berbasis Komputer (UKBK), yang memastikan mutu pembelajaran dan pengakuan hasil belajar peserta didik pada jalur nonformal.	nihil
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Faktor penunjang: - Penguatan pengelolaan dana pada satuan nonformal/kesetaraan dalam program JAKETKU turut memberikan alternatif layanan pendidikan bagi peserta didik berisiko putus sekolah, sehingga mendukung upaya pencegahan peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang layanan pendidikan.	nihil
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial	Iklim inklusivitas SD (%)	Faktor penunjang: - Adanya penguatan dalam aspek tata kelola, penerapan	nihil

	dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan		regulasi internal, serta pengembangan budaya sekolah yang aman dan non-diskriminatif. - Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai keberagaman, serta memberikan layanan yang inklusif bagi seluruh peserta didik.	
		Iklm inklusivitas SMP (%)	Faktor penunjang: - penguatan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mana satuan pendidikan diarahkan untuk menerapkan tata kelola yang menjamin perlindungan peserta didik dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan inklusif terhadap seluruh peserta didik. - Penguatan kebijakan internal sekolah, komitmen kepala sekolah dan guru, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip SRA menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, toleran, dan ramah bagi anak.	nihil
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklm keamanan SD (%)	Faktor penunjang: - Adanya penguatan dalam aspek tata kelola, penerapan regulasi internal, serta pengembangan budaya sekolah yang aman dan non-diskriminatif. - Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai keberagaman, serta memberikan layanan yang inklusif bagi seluruh peserta didik.	nihil
		Iklm keamanan SMP (%)	Faktor penunjang: - penguatan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mana satuan pendidikan diarahkan untuk menerapkan tata kelola yang menjamin perlindungan peserta didik dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman	nihil

			dan inklusif terhadap seluruh peserta didik. - Penguatan kebijakan internal sekolah, komitmen kepala sekolah dan guru, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip SRA menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, toleran, dan ramah bagi anak.	
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	Faktor penunjang: - Pemberian dana BOS dan BOP meringankan beban biaya pendidikan peserta didik, menjaga keberlangsungan operasional satuan pendidikan, serta memastikan proses pembelajaran tetap berjalan secara reguler dan berkualitas. - Penguatan pengelolaan dana pada satuan nonformal/kesetaraan turut memberikan alternatif layanan pendidikan bagi peserta didik berisiko putus sekolah, sehingga mendukung upaya pencegahan peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang layanan pendidikan.	nihil
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	Faktor penunjang: - Fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik, pembinaan karir, serta pendampingan pengembangan kompetensi, guru PAUD didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 dan memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Intervensi ini berkontribusi terhadap peningkatan proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi akademik sesuai SNP.	nihil
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.	nihil

6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	Faktor penunjang: - Melalui pembinaan kelembagaan, satuan PAUD didampingi dalam pemenuhan standar pengelolaan, administrasi, dan dokumen mutu sesuai instrumen akreditasi, sementara rehabilitasi sarana prasarana meningkatkan pemenuhan standar fisik dan layanan pembelajaran. Sinergi kedua sub kegiatan tersebut memperkuat kesiapan satuan PAUD dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan memperoleh hasil akreditasi minimal B..	nihil
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	nihil
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	nihil
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD,	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan	nihil

		SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	Faktor penunjang: - Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data kebutuhan riil guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. - Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) serta dukungan jaminan ketenagakerjaan guna menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. - Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	nihil
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	Faktor penunjang: - Penguatan proses pembelajaran melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas guru dalam implementasi pembelajaran berbasis kompetensi literasi dan numerasi. - Pengadaan buku dan bahan bacaan untuk mendukung budaya literasi di satuan pendidikan. - Pemberian hibah uang dan barang kepada SD dan SMP swasta guna menunjang ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai. - Pelaksanaan PPDB yang menjamin akses pendidikan serta menjaga keberlanjutan layanan pembelajaran. - Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) sebagai instrumen evaluasi mutu pembelajaran dan dasar perbaikan kualitas proses belajar mengajar.	nihil

		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	Faktor penunjang: - Penguatan proses pembelajaran melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas guru dalam implementasi pembelajaran berbasis kompetensi literasi dan numerasi. - Pengadaan buku dan bahan bacaan untuk mendukung budaya literasi di satuan pendidikan. - Pemberian hibah uang dan barang kepada SD dan SMP swasta guna menunjang ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai. - Pelaksanaan PPDB yang menjamin akses pendidikan serta menjaga keberlanjutan layanan pembelajaran. - Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) sebagai instrumen evaluasi mutu pembelajaran dan dasar perbaikan kualitas proses belajar mengajar.	nihil
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	Faktor penunjang: - Adanya penguatan dalam aspek tata kelola, penerapan regulasi internal, serta pengembangan budaya sekolah yang aman dan non-diskriminatif. - Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai keberagaman, serta memberikan layanan yang inklusif bagi seluruh peserta didik.	nihil

		Iklim kebhinekaan SMP (%)	Faktor penunjang: - penguatan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mana satuan pendidikan diarahkan untuk menerapkan tata kelola yang menjamin perlindungan peserta didik dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan inklusif terhadap seluruh peserta didik. - Penguatan kebijakan internal sekolah, komitmen kepala sekolah dan guru, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip SRA menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, toleran, dan ramah bagi anak.	nihil
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	Faktor penunjang: - Pemberian bantuan operasional sekolah serta hibah uang dan barang kepada satuan pendidikan untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan bagi peserta didik, termasuk anak perempuan. - Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah guna meningkatkan akses dan kenyamanan belajar di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. - Pelaksanaan PPDB yang menjamin prinsip pemerataan dan non-diskriminasi dalam penerimaan peserta didik. - Penguatan pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan untuk memastikan layanan pendidikan inklusif dan setara bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan..	nihil

3.7. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Penyerapan
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	47%	504,411,188,803.04	476,071,918,778.47	94.38
		Angka Harapan Lama Sekolah	47%	504,411,188,803.04	476,071,918,778.47	94.38
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	3%	30,730,818,000.00	28,831,747,860.00	93.82
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	3%	30,730,818,000.00	28,831,747,860.00	93.82
TOTAL				1,070,284,013,606.07	1,009,807,333,276.93	94.35

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 13 Alokasi Anggaran dan Realisasi Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Penyerapan
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD, SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	57.33%	613,582,813,518.07	592,005,201,332.04	96.48
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	7.77%	83,113,061,716.00	78,920,266,232.28	94.96

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Penyerapan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	5.54%	59,293,841,886.00	40,840,090,614.00	68.88
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	0.25%	2,626,330,000.00	2,626,329,998.00	100.00
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklm inklusivitas SD (%)	0.49%	5,197,748,666.67	2,925,776,533.33	56.29
		Iklm inklusivitas SMP (%)	0.25%	2,697,550,000.00	1,210,694,778.00	44.88
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklm keamanan SD (%)	0.49%	5,197,748,666.67	2,925,776,533.33	56.29
		Iklm keamanan SMP (%)	0.25%	2,697,550,000.00	1,210,694,778.00	44.88
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	20.30%	217,238,452,898.00	216,439,050,761.00	99.63

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Penyerapan
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	0.72%	7,694,400,000.00	7,466,400,000.00	97.04
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	1.15%	12,292,327,200.00	11,532,699,144.00	93.82
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	0.03%	374,347,966.00	291,881,778.61	77.97
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	1.15%	12,292,327,200.00	11,532,699,144.00	93.82
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	1.15%	12,292,327,200.00	11,532,699,144.00	93.82
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	1.15%	12,292,327,200.00	11,532,699,144.00	93.82
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	1.15%	12,292,327,200.00	11,532,699,144.00	93.82
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	0.02%	227,310,800.00	194,856,467.00	85.72
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	0.02%	227,310,800.00	194,856,467.00	85.72

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Penyerapan
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklm Kebhinekaan SD (%)	0.49%	5,197,748,666.67	2,925,776,533.33	56.29
		Iklm kebhinekaan SMP (%)	0.25%	2,697,550,000.00	1,210,694,778.00	44.88
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	0.07%	758,612,022.00	755,489,972.00	99.59
TOTAL				1,070,284,013,606.08	1,009,807,333,275.92	94.35

3.8 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam konteks laporan ini, efektivitas penggunaan sumber daya dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja dengan dukungan alokasi anggaran yang tersedia. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian target (efektivitas), tetapi juga menunjukkan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran (efisiensi). Dengan demikian, penghitungan ini merepresentasikan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan dalam mendukung sasaran strategis.

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*

CK_i : Capaian Keluaran *i*

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 14 Efisiensi Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	100.30%	94.38	5,90
		Angka Harapan Lama Sekolah	100%	94.38	5,62
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	101.51%	93.82	7,58
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	105.10%	93.82	10,73
TOTAL			101.73%	94.35	5,96

Berdasarkan hasil penghitungan tingkat efektivitas penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, diperoleh rata-rata efektivitas sebesar 5,96. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2021–2026 telah dilaksanakan secara efektif, dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien dalam mendukung pencapaian kinerja.

b. Renstra 2025-2029

Tabel 3. 15 Efisiensi Periode Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Tingkat Efektifitas
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	100%	96.48	3,52
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	100%	94.96	5,04
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	100%	68.88	31,12
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	114%	100.00	12,28
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim inklusivitas SD (%)	100%	56.29	43,71
		Iklim inklusivitas SMP (%)	100%	44.88	55,12
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim keamanan SD (%)	100%	56.29	43,71
		Iklim keamanan SMP (%)	100%	44.88	55,12
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	100%	99.63	0,37

5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	100%	97.04	2,96
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	100%	93.82	6,18
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	100%	77.97	22,03
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	100%	93.82	6,18
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	100%	93.82	6,18
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	100%	93.82	6,18
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100%	93.82	6,18
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	100%	85.72	14,28
		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	100%	85.72	14,28
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	100%	56.29	43,71
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	100%	44.88	55,12
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	101%	99.59	1,40
TOTAL			101%	94.35	6,58

Berdasarkan hasil penghitungan tingkat efektivitas penggunaan anggaran pada indikator kinerja yang dianggarkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memperoleh rata-rata efektivitas sebesar 6,58 persen, yang

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara cukup efektif, dengan efisiensi anggaran yang relatif baik dalam mendukung pencapaian kinerja.

3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang selaras dengan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

a. Renstra 2021-2026

Tabel 3. 16 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Program/ kegiatan Penunjang
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan partisipasi sekolah, pemerataan layanan pendidikan, serta penguatan sistem pengelolaan satuan pendidikan.

Sementara itu, pencapaian sasaran strategis Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas satuan pendidikan dan sumber daya manusia pendidikan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkelanjutan.

b. Renstra 2025-2029

**Tabel 3. 17 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Periode Renstra 2025-2029**

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Program/ kegiatan Penunjang
1	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	Program Pengelolaan Pendidikan

		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklm inklusivitas SD (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Iklm inklusivitas SMP (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklm keamanan SD (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Iklm keamanan SMP (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	Program Pengelolaan Pendidikan

		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
		Iklim kebhinekaan SMP (%)	Program Pengelolaan Pendidikan
9	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	Program Pengelolaan Pendidikan

Secara keseluruhan, keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan pada Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah didukung oleh program utama perangkat daerah. Adapun indikator yang belum didukung oleh program/kegiatan secara langsung akan menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya agar keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja dapat semakin ditingkatkan.

Dalam rangka evaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah mengikuti Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada periode observasi September–November 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memperoleh nilai 91,35 dengan kategori Kualitas Pelayanan “Sangat Baik” dan opini Kualitas Tertinggi. Capaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pemenuhan Standar Pelayanan (Dimensi Input – 22,7)

Tersedianya standar pelayanan yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, serta kompetensi aparatur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepatuhan terhadap Prosedur Pelayanan (Dimensi Proses – 19,83)

Pelaksanaan pelayanan telah mengikuti mekanisme dan SOP yang ditetapkan, termasuk keterbukaan informasi layanan dan kepastian waktu pelayanan.

c. Hasil Layanan yang Terukur (Dimensi Output – 10,72)

Pelayanan publik di bidang pendidikan telah memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam aspek administrasi maupun substansi layanan pendidikan.

d. Pengelolaan Pengaduan yang Responsif (Dimensi Pengaduan – 12,19)

Tersedianya kanal pengaduan serta mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terdokumentasi.

- e. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat (Dimensi Kepercayaan – 25,86)

Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan menunjukkan tren positif yang berdampak pada peningkatan citra kelembagaan.

Secara agregat, capaian ini turut berkontribusi terhadap nilai akhir Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 91,59 dengan kategori “Sangat Baik”.

2. Analisis Kendala dan Area Perbaikan

Meskipun telah memperoleh kategori “Sangat Baik”, masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, antara lain:

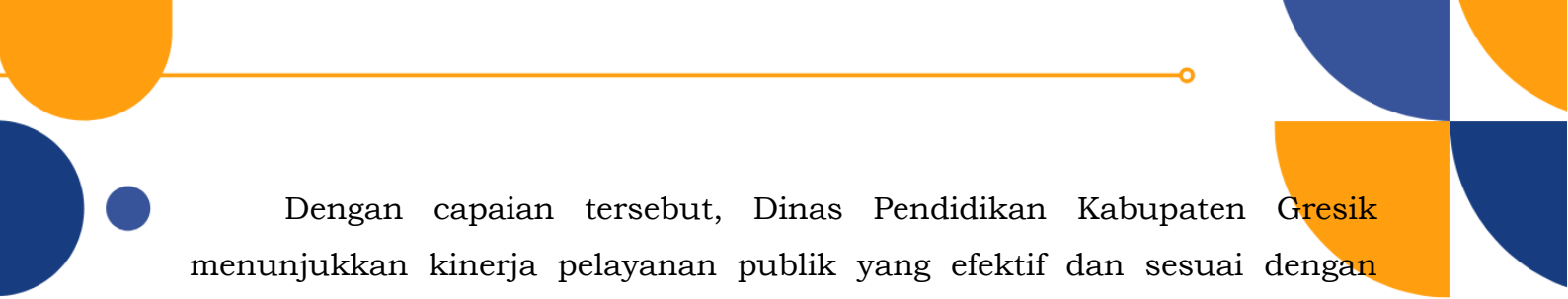
- a. Optimalisasi digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- b. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal guna menjaga konsistensi kepatuhan standar pelayanan.
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi.
- d. Perluasan publikasi standar pelayanan agar semakin mudah diakses masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada umumnya bersifat teknis dan administratif, serta dapat ditangani melalui perbaikan sistem dan penguatan koordinasi antar unit kerja.

3. Upaya Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan:

- a. Melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan dan SOP.
- b. Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital.
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima.
- d. Memperkuat sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi.
- e. Menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip anti-maladministrasi.



Dengan capaian tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari masa transisi seiring adanya periode kepala daerah tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 sekaligus awal implementasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja periode sebelumnya serta menyiapkan fondasi pencapaian sasaran strategis pada periode perencanaan yang baru.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap target kinerja yang telah tercapai maupun yang belum tercapai secara optimal, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melakukan langkah-langkah yang konstruktif dan terukur melalui proses analisis dan evaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2025 menjadi catatan penting dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Sasaran dan indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal akan dievaluasi secara menyeluruh, sehingga pencapaian kinerja pada tahun mendatang diharapkan dapat meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Evaluasi juga dilakukan terhadap capaian pembangunan jangka menengah, baik pada Renstra 2021–2026 maupun Renstra 2025–2029, agar potensi kendala dan risiko kegagalan dapat diidentifikasi sejak dini serta dirumuskan langkah-langkah mitigasi dan solusi yang tepat..

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 adalah masa transisi, di mana pengukuran kinerja masih mengacu pada target akhir Renstra 2021–2026, sekaligus mulai mengimplementasikan sasaran dan indikator dalam Renstra 2025–2029. Dalam Renstra 2021–2026, Dinas Pendidikan mengampu 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan dalam Renstra 2025–2029 terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum indikator pada Renstra 2021–2026 telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra. Sementara pada Renstra 2025–2029, sebagian besar indikator telah mencapai target kinerja tahun berjalan, termasuk indikator partisipasi pendidikan, inklusivitas, keamanan sekolah, literasi, numerasi, dan kesetaraan gender. Beberapa indikator masih memerlukan penguatan dukungan program secara lebih terstruktur pada tahun perencanaan berikutnya.
3. Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 didukung oleh 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Tingkat efektivitas penggunaan anggaran yang dihitung berdasarkan rasio antara pagu anggaran, realisasi, dan capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
4. Pada masa transisi Renstra ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya didukung oleh penganggaran secara langsung pada Tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja semakin optimal.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta guna mendukung peningkatan partisipasi pendidikan dan kualitas hasil belajar peserta didik.
2. Mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola satuan pendidikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan profesional guna mendukung peningkatan literasi, numerasi, serta iklim sekolah yang inklusif dan aman.
4. Memperkuat sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja dalam kerangka implementasi penuh Renstra 2025–2029.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 serta menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S HARIYANTO, S.Pd, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	1	Rata-rata lama sekolah	10.10 Tahun
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13.99 Tahun
2	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	1	Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	97,04 %
		2	Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	90.72 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 555,844,829,517.00	APBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 430,552,412,097.00	APBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 32,490,366,000.00	APBD
Jumlah			Rp. 1,018,887,607,614.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA PAPBD TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. S HARIYANTO, S.Pd, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

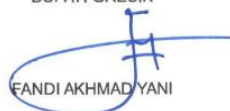
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)	1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	80.76
		2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	99.4
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	29.51
		4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	11.22
2	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	94.28
		2	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98.8
3	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	1	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	91.77
		2	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98.8
		3	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98.8
		4	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP	98.8
		5	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100
4	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar	1	Rata-rata Kemampuan Literasi	77.42
		2	Rata-rata Kemampuan Numerasi	66.86
5	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	1	Iklim Keamanan SD	64.80

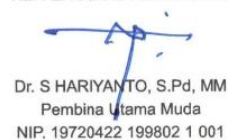
		2	Iklim Keamanan SMP	63.51
6	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	1	Iklim Kebinekaan SD	76.57
		2	Iklim Kebinekaan SMP	73.67
7	Meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar (SD, SMP) di wilayah rentan	1	Rata-rata APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan	93.09
8	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	1	Iklim Inklusivitas SD	78.90
		2	Iklim Inklusivitas SMP	74.50
9	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	1	Angka Putus Sekolah	1.42

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 589,351,630,518.07	PAPBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 419,470,747,088.00	PAPBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 61,461,636,000.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 1,070,284,013,606.07	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Dr. S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2025



Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengadakan perlombaan dengan tema “Anak terlindungi, Indonesia Maju”. Pada acara penutupan dengan diberikannya trophy, sertifikat, dan uang pembinaan bagi guru maupun siswa - siswi yang telah memenangkan perlombaan dengan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik dan juga Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kab. Gresik.

LOMBA UKS JENJANG SMP/MTS TAHUN 2025



Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menggelar Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat SMP/MTs Tahun 2025 dengan mengusung tema “Sekolah Hebat Wujudkan Generasi Emas 2045.”

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat budaya sekolah sehat, cerdas, dan berkarakter menuju cita-cita besar Indonesia Emas. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menghadirkan sekolah hebat di seluruh wilayah Kabupaten Gresik



Gebyar Pelayanan Publik di Gresik, khususnya oleh Dinas Pendidikan, diselenggarakan pada Februari 2025 di Gressmall sebagai bagian dari peringatan HUT ke-51 Pemkab dan Hari Jadi ke-538 Kabupaten Gresik. Acara ini bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di satu tempat secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

PEILAIAN OMBUDSMAN TAHUN 2025



PIAGAM PENGHARGAAN

**PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025**

DIBERIKAN KEPADA

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK**

**ATAS NILAI KUALITAS PELAYANAN*
SANGAT BAIK**

Jakarta, 29 Januari 2026
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

A blue ink signature of Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., written over a circular official stamp of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

*) Unsur dari Opini Ombudsman RI

Dalam Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mendapat Nilai Akhir 91.59 dengan Kategori Kualitas Pelayanan "Sangat Baik"